

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andrian Sutedi (2010), Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika.
- Bagir Manan, (1995) Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah, Pusat Penerbitan LPPM Universitas Bandung.
- Darda Syahrizal, S. H. (2013). Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara. Media Pressindo.
- HR Ridwan, (2006) Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hartati Nurwijaya, Zullies Ikawati dkk, (2009), Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya.
- Irfan Fachruddin, (2004), Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung.
- Karim, A. G. (2003). Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia.
- Kusumohamidjojo, B. (2019). Teori Hukum: Dilema antara Hukum dan Kekuasaan (*Edisi 2*). Yrama Widya.
- Kamal Hidjaz, (2010), Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Makassar: Pustaka Refleksi.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). Otonomi dan manajemen keuangan daerah: edisi terbaru. Penerbit Andi.
- Machmud, Zakir. (2011), Rekomendasi Kebijakan UKM di Indonesia. *Friedrich-Naumann-Stiftung Fur die Freiheit*, Jakarta.
- Marbun dan Mahfud MD, (2006), Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Cetakan keempat, Liberty, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, (2010), Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada.
- Pratiwi, C. S., Purnamawati, S. A., & Fauzi, C. Y. P. (2016). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. *Jakarta: Leip*.

Rahayu, A. S. (2022). Pengantar Pemerintahan Daerah: kajian teori, hukum dan aplikasinya. Sinar Grafika.

Rahmaini, P., Bagenda, C., & Kusnadi, H. (2022). Dasar-Dasar Ilmu Politik CV Pena Persada.

Subarsono, A. G. (2012). Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi.

Suhariyanto, D. (2023). HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, *Pengantar Hukum Indonesia*.

HASIL PENELITIAN (Skripsi/Jurnal)

Alfianti, L. (2018). Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Produksi Minuman Beralkohol Tradisional. *Yuridika*, 33(1),93-117.

Fauziah, H., Indra, M., & Ghafur, A. (2016). Aktualisasi Asas Otonomi Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah (*Doctoral dissertation, Riau University*).

Harsan, I. W. (2017). Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Pasar Di Pasar Segiri Kota Samarinda. *Journal ilmu Pemerintahan*, 145-158.

Imani, R. V. Pengndalian Peredaran Minuman Beralkohol DiKabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.

Khairiyah, H. Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(1), 1-12.

Lobo, E. A. (2023). Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan melalui Pelaksanaan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2019 di Kabupaten Bantul *Journal of Society Bridge*, 1(1), 17-41.

Mandey, J., Sumampow, I., & Kumayas, N. (2018). Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Peredaran Minuman Keras di Kecamatan Malalayang KotaMonado *Jurnal Eksekutif*, 1(1).

Mastur, H. I., & Aji, N. F. (2016). Analisis Pengendalian Kualitas Pembuatan Wellhub Dengan Pendekatan Lean Six Sigma. *Teknoin*, 22(1).

Nursetyabudi, A., Listyarini, D., & Saputra, A. (2022). Peran Ppns SatPol PP Dalam Penegakan Perda No 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Dikota Semarang. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2).

Nurmayani, S. H. (2009). MH Hukum Administrasi Daerah. *Universitas Lampung Bandarlampung*.

Oktaviani, Y. (2022). *Kewenangan Pemerintah Daerah dalam UU No. 23 Tahun 2014 terhadap Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten)* Doctoral dissertation, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pandaleke, E. R. (2017). Peranan Pemerintah Daerah Terhadap Penanganan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Minahasa Dalam Perspektif Hukum Pidana *Lex Privatum*, 5(6).

Putra, I. B. P. Y., Windari, R. A., & Adnyani, N. K. S. (2018). Penertiban Usaha Penjualan Minuman Beralkohol Melalui Kepemilikan Surat Ijin Usaha Perdagangan Di Kabupaten Buleleng, *Jurnal KomunitasYustisia*, 1(2), 132-142.

Puteri, C. G. (2015). Optimalisasi Pengawasan Pemerintah terhadap Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol di kios kios di Kota Malang (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja (*Doctoral dissertation, Brawijaya University*).

PAPUTUNGAN, R., RURU, J., & TAMPONGANGOY, D. (2019). Pengawasan Pemerintah Daerah Pada Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(82).

Risnain, M. (2017). Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Journal of Law*, 4(2), 379-398.

Rintasari, D. N., Mahendra, A. B., & Chanafi, M. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Dikota Magelang. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 1(2), 47-55.

Rahmadanita, A. (2019). Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum (studi Kasus Gelandangan dan Pengemis). *Jurnal Tatapamong*, 95-104.

Situngkir, D. A. (2023). Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum. *Ensiklopedia of Journal*, 5(4), 8-14.

Siregar, R. F. (2019). *Tinjauan fiqh muamalah terhadap pengaturan Peredaran minuman beralkohol dalam peraturan menteri Perdagangan Nomor 06/m-dag/per/2015* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).

Sirajuddin, I. A. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 1-14.

Satyo, T. (2017). Peran Satpol PP dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang, Pengendalian, Pengawasan, Penertiban, dan Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas. *Unnes Political Science Journal*, 1(1), 80-89.

Saputra, R. (2019). Implementasi Kebijakan Pengawasan dan pengendalian penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 21-36.

UMULUDDIN, F. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Dan Perizinan Minuman Beralkohol Terhadap Penghentian Peredaran Minuman Beralkohol Jenis Arak Di Belitung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Permendag No 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

INTERNET

<https://rri.co.id/jember/polhukam/hukum-dan-ham/1307027/ribuan-botol-miras-dan-narkoba-dimusnahkan-jelang-tahun-baru>

<https://k-radiojember.com/berita/read/polres-jember-musnahkan-ribuan-botol-miras-dan-obat-obatan-terlarang>.

<https://satpolpp.slemankab.go.id/dimana-saja-minuman-beralkohol-boleh-dijual-yuk-simak-aturannya/>.

<https://setkab.go.id/pengertian-monitoring-dan-evaluasi-kebijakan-pemerintah/>

<http://eprints.umk.ac.id/333/4/>

